

PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DISTRIK MISOOL TIMUR KABUPATEN RAJA AMPAT

Sattu^{1*}, La Ode Hasanuddin², Awal Fikri³

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: drssattu@gmail.com

Citation (APA):

Sattu, S., Hasanuddin, L. O., & Fikri, A. (2026). Penerapan E-Kinerja dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 128–140.

<https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5725>

Email Authors:

drssattu@gmail.com

ode_hasanuddin@gmail.com

ruiawalfikri@gmail.com

Submitted: 14 Mei, 2026

Accepted: 08 Juni, 2026

Published: 25 Juni, 2026

Copyright © 2026 Sattu, La Ode Hasanuddin, Awal Fikri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penguatan tata kelola kinerja Aparatur Sipil Negara melalui sistem digital yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja, khususnya pada wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-kinerja dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur yang terlibat dalam penggunaan e-kinerja. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-kinerja telah membantu pencatatan aktivitas kerja ASN secara lebih sistematis, memperkuat keterlacakan laporan kinerja, serta mendukung pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Dari sisi akuntabilitas, e-kinerja mendorong ASN lebih bertanggung jawab karena laporan kerja menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Namun, penerapannya belum optimal akibat keterbatasan jaringan internet, listrik, kondisi geografis kepulauan, dan kemampuan teknologi sebagian pegawai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-kinerja berperan positif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas ASN, tetapi memerlukan dukungan infrastruktur digital, pelatihan pegawai, dan mekanisme pelaporan yang adaptif.

Kata kunci: E-Kinerja; Transparansi; Akuntabilitas; ASN; Pemerintahan Digital.

ABSTRACT

This study was motivated by the need to strengthen the performance management of the Civil Service through a digital system capable of enhancing transparency and accountability in work, particularly in island regions with limited infrastructure. This study aims to analyze the implementation of e-performance in enhancing the transparency and accountability of the Civil Service in East Misool District, Raja Ampat Regency. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of officials involved in the use of e-performance. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, as well as drawing and verifying conclusions. The research results indicate that e-performance has facilitated the more systematic recording of civil servants' work activities, strengthened the traceability of performance reports, and supported managerial oversight of employees' task execution. From an accountability perspective, e-performance encourages civil servants to be more responsible, as work reports serve as the basis for performance evaluation and assessment. However, its implementation remains suboptimal due to limited internet and electricity access, the archipelagic geographical conditions, and the technological capabilities of some employees. This study concludes that e-performance plays a positive role in strengthening transparency and accountability among civil servants, but requires support in the form of digital infrastructure, training for employees, and adaptive reporting mechanisms.

Keywords: E-Performance; Transparency; Accountability; Civil Servants; Digital Government.

PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola pemerintahan menempatkan digitalisasi birokrasi sebagai instrumen penting dalam memperkuat kinerja aparatur, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pelayanan, tetapi juga dengan kemampuan organisasi pemerintah untuk menampilkan proses kerja yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya transformasi manajemen ASN, termasuk digitalisasi sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan peningkatan profesionalitas aparatur. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN menempatkan pengelolaan kinerja sebagai proses yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja, perilaku kerja, dialog kinerja, serta keterkaitan antara kinerja individu dan kinerja organisasi.

Salah satu instrumen yang relevan dalam digitalisasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara adalah e-kinerja. Secara normatif, e-kinerja merupakan sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai ASN yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja secara elektronik (Badan Kepegawaian Negara, 2026). Dengan demikian, e-kinerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administrasi kepegawaian, tetapi juga sebagai mekanisme manajerial yang menghubungkan target kerja, realisasi pekerjaan, bukti dukung, penilaian atasan, dan hasil evaluasi kinerja dalam satu sistem yang lebih terdokumentasi.

Penerapan e-kinerja memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Transparansi diperkuat karena aktivitas kerja ASN, rencana aksi, capaian kinerja, serta bukti dukung dapat dicatat dan ditelusuri secara lebih terbuka melalui sistem. Akuntabilitas juga meningkat karena setiap capaian kinerja tidak hanya dinilai berdasarkan laporan subjektif, tetapi perlu dikaitkan dengan target, perilaku kerja, bukti pelaksanaan, dan tanggung jawab jabatan. Hal ini sejalan dengan temuan (Gae & Ardiansyah, 2025) yang menunjukkan bahwa e-kinerja membantu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan kinerja ASN secara lebih tertib, terstruktur, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif tata kelola digital, sistem seperti e-kinerja juga dapat memperkuat akuntabilitas apabila didukung oleh kejelasan data, mekanisme validasi, proses audit, dan kemampuan sistem dalam menjelaskan dasar penilaian kinerja (Saldanha et al., 2022). Oleh karena itu, e-kinerja dapat dipahami sebagai instrumen strategis untuk mendorong pengelolaan kinerja ASN yang lebih transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian mengenai e-kinerja berkaitan erat dengan konsep *digital government*, manajemen kinerja sektor publik, transparansi, dan akuntabilitas (Robiyandi et al., 2025). Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam sektor publik bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan perubahan proses, struktur, dan nilai kerja organisasi pemerintah. Saldanha et al. (2022) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam layanan digital perlu dilihat melalui aspek aksesibilitas, kejelasan informasi, validasi data, mekanisme audit, serta kemampuan sistem untuk menjelaskan proses dan hasilnya. Sementara itu, (Ingrams, 2018) menunjukkan bahwa transparansi akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan manajemen kinerja berbasis hasil, bukan hanya penyediaan informasi secara formal. Dalam konteks e-kinerja, transparansi tidak cukup dipahami sebagai keterbukaan data, tetapi juga sebagai kejelasan prosedur kerja, keterukuran indikator, dan keterlacakan proses penilaian kinerja ASN.

Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan e-kinerja karena distrik merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan administratif masyarakat. Publikasi BPS Distrik Misool Timur Dalam Angka 2025 menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik pemerintahan, kependudukan, sosial, transportasi, komunikasi, dan pelayanan dasar yang perlu dipahami dalam membaca efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Dalam wilayah kepulauan, penerapan sistem digital memiliki nilai strategis karena dapat membantu dokumentasi kerja, pemantauan aparatur, dan pelaporan kinerja secara lebih tertib. Namun, efektivitas e-kinerja tidak dapat diasumsikan berjalan otomatis, sebab keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan input data, kualitas jaringan, komitmen pimpinan, serta mekanisme verifikasi terhadap laporan kinerja yang dimasukkan ke dalam sistem.

Permasalahan utama yang muncul ketika diadakan observasi langsung terhadap lokasi penelitian di Distrik Misol Timur adalah bahwa penerapan e-kinerja sering kali masih dipahami sebatas kewajiban pengisian aplikasi, bukan sebagai instrumen penguatan tata kelola ASN. Apabila e-kinerja hanya digunakan untuk memenuhi prosedur administratif, maka sistem tersebut belum tentu mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara substantif. Transparansi dapat menjadi lemah ketika informasi kinerja tidak mudah dipahami, indikator kerja tidak jelas, atau laporan aktivitas tidak mencerminkan pekerjaan nyata. Akuntabilitas juga dapat terganggu apabila penilaian kinerja tidak disertai bukti dukung yang memadai, tidak diverifikasi secara konsisten, atau tidak digunakan sebagai dasar pembinaan aparatur. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan e-kinerja perlu diarahkan untuk melihat bagaimana sistem ini benar-benar bekerja dalam praktik birokrasi sehari-hari.

Kesenjangan penelitian terlihat dari masih terbatasnya kajian yang secara khusus menempatkan e-kinerja pada level distrik, terutama pada wilayah kepulauan seperti Misool Timur. Beberapa studi memang telah menelaah e-kinerja pada level kecamatan atau kantor camat, seperti Kantor Camat Klungkung oleh (Indrawan, 2021), Kecamatan Cipondoh oleh (Fadillah et al., 2024), Kecamatan Ende Timur oleh (Gae & Ardiansyah, 2025), serta Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang oleh (Rahim et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik merepresentasikan konteks distrik kepulauan yang memiliki tantangan geografis, akses layanan, keterbatasan infrastruktur digital, serta jarak administratif antarkampung. Sebagian penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas e-kinerja pada lingkup pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, atau unit administratif tertentu dengan fokus pada produktivitas, motivasi kerja, efektivitas penilaian, dan kualitas pelayanan, misalnya pada BKDPSPDM Kota Medan oleh (Purba et al., 2022), Kabupaten Banyuwangi oleh (Rania, 2024), serta Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana oleh (Amirsyah et al., 2024). Kajian tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana e-kinerja membentuk transparansi dan akuntabilitas ASN pada unit kewilayahan yang berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah kabupaten dan kebutuhan administratif masyarakat di kampung-kampung. Padahal, distrik memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah kabupaten dan kebutuhan administratif masyarakat kampung. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang akademik untuk memperjelas hubungan antara penerapan e-kinerja, transparansi kerja aparatur, dan pertanggungjawaban kinerja ASN dalam konteks pemerintahan lokal kepulauan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa digitalisasi birokrasi tidak berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi benar-benar memperbaiki kualitas tata kelola ASN. Bagi pemerintah distrik, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai perbaikan prosedur pengisian e-kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan verifikasi laporan, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pembinaan. Bagi pengembangan ilmu administrasi publik, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang digitalisasi manajemen kinerja ASN pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik administratif berbeda dengan wilayah perkotaan. Dengan arah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret dengan menganalisis penerapan e-kinerja dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (Sukmana et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai penerapan e-kinerja dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat. Menurut (Creswell & Poth, 2016), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, serta proses sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Sementara itu, (Yin, 2018) menjelaskan bahwa studi kasus relevan digunakan ketika peneliti ingin mengkaji suatu fenomena secara mendalam pada lokasi, institusi, atau unit sosial tertentu. Dengan demikian, Distrik Misool Timur diposisikan sebagai lokus penelitian karena memiliki karakteristik geografis kepulauan yang memengaruhi implementasi sistem digital pemerintahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan, yaitu pihak yang ada pada Distrik Misol di mana mereka yang menggunakan e-kinerja, seperti pimpinan distrik, sekretaris distrik, kepala seksi, staf administrasi, serta ASN pengguna e-kinerja. Data sekunder diperoleh melalui dokumen pendukung, regulasi, laporan kinerja, arsip administrasi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman ASN dalam menggunakan e-kinerja, hambatan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban kerja. Observasi dilakukan untuk mencermati kondisi faktual penggunaan e-kinerja, termasuk keterbatasan jaringan internet, listrik, dan kesiapan perangkat kerja. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara melalui bukti tertulis yang berkaitan dengan pelaporan dan evaluasi kinerja ASN.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu penerapan e-kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi pola temuan lapangan, kemudian menghubungkannya dengan konsep transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Kinerja dalam Meningkatkan Transparansi Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur

Penerapan e-kinerja di Distrik Misool Timur mengindikasikan adanya pergeseran tata kelola kinerja ASN dari pola administratif konvensional menuju sistem pencatatan kerja yang lebih terdokumentasi, terukur, dan dapat ditelusuri. Keterangan Ferdinand Ebit Moom, S.STP., La Ode Sainuddin, Safia Sarasa, S.IP., Wa Binadia, dan Dina Kakiy menunjukkan kesamaan pandangan bahwa e-kinerja telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas ASN, meskipun tingkat implementasinya belum optimal. Dalam konteks ini, transparansi tampak melalui pencatatan aktivitas kerja ASN secara sistematis, sedangkan akuntabilitas terlihat dari adanya kewajiban pegawai untuk melaporkan realisasi pekerjaan sebagai dasar penilaian kinerja. Temuan ini sejalan dengan Gae dan Ardieansyah (2025) yang menjelaskan bahwa e-kinerja berperan dalam meningkatkan kedisiplinan, akuntabilitas kerja, efisiensi pelaporan, serta dokumentasi kinerja ASN secara lebih tertib.

Secara substantif, e-kinerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja birokrasi. Setiap kegiatan ASN yang tercatat dalam sistem dapat menjadi bukti kerja, dasar evaluasi, serta sarana pengawasan atasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Hal ini memperkuat prinsip transparansi karena proses kerja tidak lagi hanya bergantung pada laporan lisan atau penilaian subjektif, tetapi dapat ditelusuri melalui catatan digital. BKN juga menegaskan bahwa pengembangan fitur kinerja harian dalam e-Kinerja diarahkan untuk memperkuat budaya kerja ASN yang produktif, transparan, dan berorientasi hasil, serta menjadikan data kinerja harian sebagai dasar yang lebih akurat dalam menilai kontribusi ASN dibandingkan hanya mengandalkan absensi.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas e-kinerja sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur wilayah. Distrik Misool Timur sebagai wilayah pesisir dan kepulauan menghadapi kendala listrik serta jaringan internet yang belum stabil. Kondisi ini menyebabkan pengisian e-kinerja belum selalu dapat dilakukan secara real time dan sering disesuaikan dengan ketersediaan jaringan. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa hambatan penerapan e-kinerja bukan semata-mata berasal dari rendahnya komitmen ASN, melainkan juga dari ketimpangan akses teknologi di daerah kepulauan. Setyanto et al. (2025) menegaskan bahwa *e-government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui akses informasi dan proses monitoring yang lebih baik, tetapi kesenjangan literasi digital dan digital divide masih menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan manfaatnya.

Dalam perspektif tata kelola digital, kondisi Distrik Misool Timur memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan digital dan realitas implementasi lokal. Secara normatif, sistem e-kinerja menuntut pelaporan yang cepat, teratur, dan berbasis data; tetapi secara empiris, ASN di wilayah kepulauan harus menyesuaikan pengisian sistem dengan kondisi listrik dan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-kinerja tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan aplikasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyediakan prasyarat implementasi, seperti jaringan internet, listrik, perangkat kerja, pelatihan pegawai, dan prosedur teknis yang adaptif terhadap wilayah terpencil. Saldanha et al. (2022) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas layanan digital publik perlu dilihat melalui aspek aksesibilitas, akuntabilitas, audit, validasi, akurasi, dan perlindungan data. Dengan demikian, keterbatasan akses internet

di Misool Timur berpotensi mengurangi kualitas transparansi karena data kinerja tidak selalu dapat diperbarui secara tepat waktu.

Penerapan e-kinerja di Distrik Misool Timur tetap dapat dipahami sebagai langkah strategis modernisasi birokrasi pada tingkat distrik. Sistem ini telah membantu pendataan aktivitas kerja ASN, meningkatkan keterbukaan pelaksanaan tugas, serta mendorong kedisiplinan pegawai. Akan tetapi, manfaat tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat kendala jaringan, listrik, kondisi geografis, dan kemampuan teknologi sebagian pegawai. Dengan demikian, peningkatan transparansi ASN melalui e-kinerja memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kewajiban pelaporan, tetapi juga pada penguatan ekosistem pendukung. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur digital, menyediakan pelatihan teknis berkala, menetapkan mekanisme pengisian alternatif ketika jaringan terganggu, serta memperkuat peran pimpinan dalam melakukan verifikasi dan evaluasi kinerja. Bertot et al. (2010) menegaskan bahwa teknologi informasi dapat menjadi sarana penting untuk membangun budaya keterbukaan pemerintahan, tetapi manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan dan akses teknologi yang memadai.

Tabel I. Hasil Wawancara Penerapan E-Kinerja dalam Meningkatkan Transparansi ASN

Informan	Peran di Pemerintahan	Hasil Wawancara
Ferdinant Ebit Moom, S.STP.	Kepala Distrik Misool Timur	Penerapan e-kinerja di Distrik Misool Timur telah berjalan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas ASN, namun belum optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses listrik dan jaringan internet yang belum stabil, sehingga pengisian e-kinerja belum dapat dilakukan secara real time dan sering mengalami keterlambatan, terutama pada wilayah pesisir dan kepulauan (11 Januari 2026)
La Ode Sainuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	E-kinerja berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan jaringan dan kondisi geografis Raja Ampat yang terpencil, e-kinerja dinilai sebagai instrumen yang relevan untuk meningkatkan kinerja ASN di tingkat distrik (11 Januari 2026).
Safia Sarasa, S.IP	Staf / Penelaah Teknis Kebijakan	E-kinerja memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi kerja ASN karena setiap tugas yang dilaksanakan tercatat secara sistematis. Di wilayah Raja Ampat yang memiliki keterbatasan akses teknologi, e-kinerja dinilai sebagai upaya modernisasi tata kelola kinerja, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jaringan dan kemampuan teknologi sebagian pegawai (14 Januari 2026).
Wa Binadia	Staf / Pengelola Data dan Informasi	E-kinerja sangat membantu dalam pendataan aktivitas kerja ASN. Akan tetapi, sebagai wilayah pesisir dan kepulauan, Distrik Misool Timur masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, pengisian e-kinerja sering dilakukan ketika jaringan tersedia, sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi lokal (14 Januari 2026).
Dina Kakiay	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	E-kinerja dipahami sebagai sistem yang membantu pengelolaan kinerja ASN secara lebih tertib dan terdata. Dalam konteks Distrik Misool Timur yang berada di wilayah kepulauan, e-kinerja dinilai penting untuk memastikan kedisiplinan pegawai meskipun kondisi jaringan internet

sering tidak stabil. Informan menilai bahwa e-kinerja telah mendorong keterbukaan kinerja, namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur agar pelaksanaannya lebih optimal (11 Januari 2026).

Sumber: Data penelitian 2025

Penerapan e-kinerja dalam meningkatkan transparansi ASN di Distrik Misool Timur dapat dinilai telah berjalan secara positif, tetapi masih berada pada tahap penguatan. E-kinerja telah menciptakan mekanisme kerja yang lebih tertib, terdata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, optimalisasi sistem ini membutuhkan dukungan infrastruktur, peningkatan literasi digital pegawai, dan penyesuaian kebijakan teknis terhadap karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan. Oleh karena itu, e-kinerja di Distrik Misool Timur sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai aplikasi administratif, melainkan sebagai instrumen reformasi birokrasi yang keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kapasitas ASN, dan komitmen kelembagaan dalam membangun transparansi pemerintahan daerah.

Penerapan E-Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur

Penerapan *e-kinerja* dalam meningkatkan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja aparatur. Data wawancara mengindikasikan bahwa e-kinerja telah mendorong ASN untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harian karena setiap aktivitas kerja harus dicatat, dilaporkan, dan dapat dipantau oleh pimpinan. Pandangan ini terlihat dari keterangan Yason Mjam selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa e-kinerja digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan sehari-hari. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Distrik Misool Timur, sistem ini menjadi penting karena pengawasan langsung antarkampung tidak selalu dapat dilakukan secara intensif. Dengan adanya pelaporan digital, pimpinan tetap memiliki dasar untuk menilai pelaksanaan tugas pegawai meskipun jarak geografis dan kondisi transportasi laut menjadi kendala dalam proses pengawasan langsung.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas kinerja sektor publik yang menekankan kewajiban aparatur untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menunjukkan hasil kerja secara terukur. Zulfa et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diarahkan untuk memperkuat tata kelola yang berorientasi pada hasil, meskipun dalam praktiknya masih sering berhenti pada pemenuhan administratif. Dalam konteks Distrik Misool Timur, e-kinerja telah menyediakan mekanisme pencatatan yang lebih sistematis, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur. Artinya, sistem digital telah membentuk kerangka akuntabilitas, tetapi kualitas akuntabilitas tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparatur dan dukungan lingkungan kerja untuk menjalankan sistem secara konsisten.

Keterangan Gideon Mjam, S.IP., M.Si. memperkuat analisis tersebut. Informan menilai bahwa penerapan e-kinerja mendorong ASN untuk lebih bertanggung jawab karena laporan kinerja berkaitan dengan penilaian kinerja dan tunjangan. Hal ini menunjukkan bahwa e-kinerja bekerja melalui mekanisme insentif dan evaluasi. Ketika laporan kinerja menjadi dasar penilaian, pegawai memiliki dorongan yang lebih besar untuk melaksanakan tugas secara tertib, mencatat aktivitas kerja, dan menghindari kelalaian

administratif. Dalam perspektif *performance-based management*, pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan evaluasi dan imbalan dapat memperkuat akuntabilitas karena pegawai tidak hanya bekerja berdasarkan perintah struktural, tetapi juga berdasarkan indikator yang terdokumentasi. Namun demikian, Gideon juga menegaskan bahwa kondisi geografis yang terpencil menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pengisian *e-kinerja*. Dengan demikian, akuntabilitas ASN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh akses terhadap jaringan, kemampuan teknologi, dan kesinambungan dukungan kelembagaan.

Marlon Brando Mjam, S.Sos. menilai bahwa *e-kinerja* meningkatkan keterbukaan informasi kinerja internal karena pimpinan dapat mengetahui aktivitas ASN secara rinci. Walaupun indikator utama dalam pembahasan ini adalah akuntabilitas, aspek transparansi internal tetap relevan karena akuntabilitas membutuhkan informasi yang dapat ditelusuri. Wijaya et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan *electronic government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui perluasan akses informasi, efisiensi layanan, serta sistem pemantauan yang lebih efektif. Pada Distrik Misool Timur, fungsi tersebut tampak dalam kemampuan pimpinan untuk memantau aktivitas ASN meskipun pegawai tidak selalu berada di kantor. Kondisi ini menunjukkan bahwa *e-kinerja* membantu mengurangi ketergantungan pada pengawasan tatap muka dan menggantikannya dengan dokumentasi aktivitas berbasis sistem.

Keterangan Asrul Juanda Setiawan sebagai Staf/Pengadministrasi Perkantoran menunjukkan bahwa *e-kinerja* memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas karena laporan kerja menjadi dasar evaluasi. ASN terdorong untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya karena setiap aktivitas dapat dicatat dan diperiksa kembali. Selain itu, informan juga menilai bahwa sistem ini mendorong disiplin dan ketertiban administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa *e-kinerja* tidak hanya memengaruhi pelaporan, tetapi juga membentuk perilaku kerja aparatur. Namun, informan menekankan perlunya peningkatan pelatihan teknologi agar seluruh pegawai mampu memanfaatkan sistem secara optimal. Pernyataan ini penting karena akuntabilitas digital tidak dapat berjalan efektif apabila kapasitas pengguna tidak memadai. Sofyani et al. (2020) menegaskan bahwa tata kelola teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan *e-kinerja* perlu disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia, bukan hanya penyediaan aplikasi.

Keterangan Muhammad Yusuf Buatun, S.E. selaku Sekretaris Distrik Misool Timur memperlihatkan dimensi struktural dari penerapan *e-kinerja*. Informan menjelaskan bahwa *e-kinerja* membantu menertibkan administrasi dan pengawasan kinerja ASN, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur. Keterbatasan listrik dan jaringan internet menyebabkan sistem belum berjalan optimal secara *real time*, sehingga pelaporan kinerja sering dilakukan secara tertunda. Hal serupa disampaikan Simson Moom selaku Kasi Pelayanan Umum, yang menyatakan bahwa keterbatasan akses listrik dan jaringan internet membuat ASN harus menyesuaikan waktu pelaporan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlambatan pengisian *e-kinerja* tidak selalu merepresentasikan rendahnya kepatuhan ASN, tetapi dapat mencerminkan keterbatasan objektif wilayah kepulauan. Oleh sebab itu, evaluasi akuntabilitas ASN di Distrik Misool Timur perlu mempertimbangkan konteks geografis agar tidak menghasilkan penilaian yang bias terhadap aparatur yang bekerja dalam kondisi infrastruktur terbatas.

Secara analitis, penerapan e-kinerja di Distrik Misool Timur memperlihatkan tiga kontribusi utama terhadap akuntabilitas ASN. Pertama, sistem ini memperkuat dokumentasi kinerja karena aktivitas pegawai tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi dicatat dalam sistem. Kedua, e-kinerja memperjelas hubungan antara tugas, laporan, evaluasi, dan tunjangan sehingga pegawai memiliki dorongan lebih kuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara terukur. Ketiga, sistem ini membantu pimpinan melakukan pengawasan jarak jauh pada wilayah kepulauan yang sulit diawasi secara langsung. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala jaringan internet, keterbatasan listrik, kemampuan teknologi pegawai, serta kebutuhan toleransi waktu pengisian.

Tabel II. Hasil Wawancara Penerapan E-Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas ASN

Informan	Peran di Pemerintahan	Hasil Wawancara
Muhammad Yusuf Buatan, SE.	Sekretaris Distrik Misool	E-kinerja membantu menertibkan administrasi dan pengawasan kinerja ASN, namun efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur serta keterbatasan listrik dan jaringan internet menyebabkan sistem e-kinerja belum berjalan secara optimal dan real time, sehingga pelaporan kinerja ASN sering dilakukan secara tertunda (11 Januari 2026).
Yason Mjam	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	E-kinerja telah digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan kerja sehari-hari. Namun, pelaksanaannya sering menyesuaikan dengan kondisi geografis dan cuaca laut yang memengaruhi jaringan internet. Dalam pandangannya, e-kinerja membantu meningkatkan tanggungjawab ASN, karena setiap aktivitas harus dilaporkan dan dapat dipantau oleh pimpinan meskipun jarak antarkampung cukup jauh (11 Januari 2026).
Gideon Mjam, S.IP., M.Si	Staf / Penelaah Teknis Kebijakan	E-kinerja telah mendorong ASN untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Akuntabilitas kinerja menjadi lebih terukur karena laporan e-kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja dan tunjangan. Namun demikian, informan menegaskan bahwa kondisi geografis Distrik Misool Timur yang terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pengisian e-kinerja (12 Januari 2026).
Marlon Brando Mjam, S.Sos	Staf / Penelaah Teknis Kebijakan	e-kinerja meningkatkan transparansi karena pimpinan dapat mengetahui aktivitas ASN secara rinci. Hal ini sangat relevan di Distrik Misool Timur, di mana pengawasan langsung sulit dilakukan akibat kondisi geografis kepulauan. Dengan e-kinerja, kinerja ASN tetap dapat dipantau meskipun tidak selalu berada di kantor (12 Januari 2026).
Asrul Juanda Setiawan	Staf / Pengadministrasi Perkantoran	E-kinerja memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas ASN. Setiap pegawai terdorong untuk melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab karena laporan kinerja menjadi dasar evaluasi. Namun, informan juga menekankan perlunya peningkatan pelatihan teknologi agar seluruh pegawai mampu memanfaatkan sistem e-kinerja secara maksimal. Lanjutan Wawancara: e-kinerja mendorong pegawai untuk lebih disiplin dan tertib administrasi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kendala teknis akibat jaringan internet yang tidak stabil. Informan menilai bahwa dukungan pimpinan yang memberikan toleransi waktu pengisian sangat membantu ASN dalam menjalankan kewajiban e-kinerja di tengah keterbatasan wilayah (12 Januari 2026).
Simson Moom	Kasi Pelayanan Umum	E-kinerja berperan dalam meningkatkan transparansi

pelayanan publik, tetapi masih menghadapi kendala teknis. Keterbatasan akses listrik dan jaringan internet menyebabkan pengisian e-kinerja belum dapat dilakukan secara real time, sehingga ASN harus menyesuaikan waktu pelaporan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia di Distrik Misool Timur (12 Januari 2026).

Sumber: Data penelitian 2025

Dengan demikian, e-kinerja dapat dipahami sebagai instrumen akuntabilitas yang potensial, tetapi belum sepenuhnya ideal dalam konteks daerah terpencil. Miao et al. (2025) menegaskan bahwa pemantauan kinerja elektronik dapat dipersepsikan secara berbeda oleh pegawai, bergantung pada apakah sistem tersebut dipahami sebagai alat kontrol semata atau sebagai sarana pengembangan kinerja. Dalam kasus Distrik Misool Timur, e-kinerja cenderung diterima sebagai instrumen yang membantu penertiban administrasi dan tanggung jawab kerja, tetapi implementasinya harus tetap disertai pendekatan adaptif. Dukungan pimpinan berupa toleransi waktu pengisian merupakan strategi yang relevan agar sistem tidak menjadi beban administratif yang mengabaikan kondisi geografis. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas ASN melalui e-kinerja perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur digital, pelatihan teknologi, penyusunan mekanisme pengisian yang fleksibel bagi wilayah kepulauan, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pembinaan aparatur secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-kinerja dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat telah berjalan cukup positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. E-kinerja terbukti membantu mengubah proses pelaporan kinerja ASN dari pola manual yang cenderung administratif menjadi lebih terdokumentasi, terukur, dan mudah ditelusuri. Melalui sistem ini, aktivitas kerja pegawai dapat dicatat secara lebih sistematis sehingga pimpinan memiliki dasar yang lebih jelas dalam melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa e-kinerja berperan dalam memperkuat transparansi internal karena pelaksanaan tugas ASN tidak hanya bergantung pada laporan lisan, tetapi dapat diperiksa melalui catatan digital.

Dari sisi akuntabilitas, e-kinerja mendorong ASN untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas hariannya. Setiap pegawai memiliki kewajiban melaporkan realisasi pekerjaan, sehingga terdapat hubungan yang lebih jelas antara tugas, pelaksanaan kerja, laporan kinerja, evaluasi pimpinan, dan pemberian tunjangan. Dengan demikian, e-kinerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja aparatur. Sistem ini membantu membangun kedisiplinan, ketertiban administrasi, serta kesadaran ASN bahwa setiap aktivitas kerja harus dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penerapan e-kinerja masih menghadapi kendala yang cukup nyata. Karakteristik Distrik Misool Timur sebagai wilayah kepulauan menyebabkan akses jaringan internet dan listrik belum selalu stabil. Akibatnya, pengisian e-kinerja belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *real time* dan sering menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Selain itu, kemampuan teknologi sebagian pegawai masih perlu ditingkatkan agar penggunaan sistem dapat berjalan lebih merata.

Dengan demikian, penerapan e-kinerja di Distrik Misool Timur dapat disimpulkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas ASN, tetapi masih berada pada tahap penguatan. Optimalisasi sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur digital, pelatihan teknis berkala, mekanisme pengisian yang adaptif terhadap wilayah kepulauan, serta pengawasan pimpinan yang konsisten. Tanpa dukungan tersebut, e-kinerja berisiko hanya menjadi kewajiban administratif, bukan instrumen reformasi birokrasi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, T., Aftab, M., Abbas, Z., Ugli, K. M. M., & Bokhari, S. A. A. (2023). Impact of e-government initiatives to combat corruption mediating by behavioral intention: A quantitative analysis from emerging economies. *Sustainability*, 15(3), 2694. doi: 10.3390/su15032694
- Amirsyah, M., Nugroho, R. A., & Hidayat, R. (2024). Implementasi kebijakan e-kinerja bagi Aparatur Sipil Negara: Studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2352–2367. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2448>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. (2025). *Distrik Misool Timur Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Raja Ampat.
- Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara*.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fadillah, D., Hilman, H., & Badar, R. (2024). Penerapan aplikasi e-kinerja bagi pegawai di Kecamatan Cipondoh. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 189–198. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10637678>
- Gae, A. C. F., & Ardieansyah, A. (2025). Implementasi aplikasi e-kinerja untuk meningkatkan kinerja ASN di Kecamatan Ende Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(3), 1081–1090. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1895>
- Halachmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, e-government, and accountability: Some issues and considerations. *Public Performance & Management Review*, 36(4), 562–584. doi: 10.2753/PMR1530-9576360404
- Indrawan, I. W. I. (2021). Penerapan elektronik kinerja (e-kinerja) terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.55-65>

- Ingrams, A. (2018). Transparency for results: Testing a model of performance management in open government initiatives. *International Journal of Public Administration*, 41(13), 1033–1046. doi: 10.1080/01900692.2017.1318400
- Miao, Q., Yin, H., Schwarz, G., & Hussain, M. A. (2025). Disentangling the impact of perceived electronic performance monitoring on employee burnout in the public sector. *Public Management Review*, 27(12), 3028–3056. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2396080>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. doi: 10.1016/j.giq.2019.06.002
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. DOI: tidak tersedia karena merupakan regulasi resmi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. DOI: tidak tersedia karena merupakan regulasi resmi.
- Purba, H. S. H., Sinaga, K., & Siregar, F. A. (2022). Peranan Aplikasi E-Kinerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemko Medan). *Jurnal Publik Reform*, 9(1), 26-33.
- Rahim, O., Idris, A., & Rande, S. (2025). Implementation of the electronic performance system for state civil apparatus at the Tenggara Seberang Sub-District Office. *Buletin Poltanesa*, 26(1), 408–413. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v26i1.3392>
- Rania, G. (2024). Implementasi e-kinerja terhadap penilaian kinerja PNS di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v4i1.4106>
- Robiyandi, Saipul, & Indarto, K. (2025). Implementation of the e-kinerja system to improve public service quality at Bukit Biru Village. *Buletin Poltanesa*, 26(1). doi: 10.51967/tanesa.v26i1.3207
- Saldanha, D. M. F., Dias, C. N., & Guillaumon, S. (2022). Transparency and accountability in digital public services: Learning from the Brazilian cases. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101680. doi: 10.1016/j.giq.2022.101680
- Setyarto, D. B., Alimuddin, Mulyaningsih, & Judijanto, L. (2025). The role of e-government in increasing transparency and accountability of public administration in the digital era. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 1771–1783. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4908>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Sukmana, O., Machmud, M., Basri, L., Khoirurrosyidin, K., Sari, A. F., Jumui, J., Saputro, D., Remtulla, A. N., Walikrom, A. A. R., Arusani, A., & Damanik, F. H. S. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual dan Praktis*. Star Digital Publishing.

- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2020). The impact of the performance measurement system on the organizational performance of the public sector in a transition economy: Is public accountability a missing link? *Cogent Business & Management*, 7(1), 1792669. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1792669>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. doi: 10.1016/j.jsis.2019.01.003
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, I. M., & Imawan, S. A. (2025). Assessing the performance: e-government in public services in Semarang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 23–32. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v10i1.14024>
- Wijaya, S., Alfitri, Thamrin, M. H., & Salya, D. H. (2024). The impact of electronic government policy on transparency and accountability in public services. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 411–421. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1157>
- Zulfa, S., Anastasya, A. P., Sari, S. N., Putri, D., & Aulia, H. (2025). Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja: Studi kasus pada BPBD Kota Magelang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).26767](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).26767)

PROFIL SINGKAT

Drs. Sattu, M.Si lahir di Bantoesunggu Maros, Tanggal 31 Desember 1962. Pendidikan terakhir S2. Administrasi Publik pada Universitas 45, saat ini bekerja sebagai dosen pada program Studi Ilmu Administrasi Negera di Universitas Muhammadiyah Sorong sejak tahun 2002 hingga saat ini.